

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat di pertanggung jawab kan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (RKT Kecamatan-Panyileukan,2015)

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab sehingga perlu adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai wujud pertanggung jawaban dalam lembaga pemerintah. Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada masing-masing lembaga, pengawasan dan penilai akuntabilitas, maka misi dan tujuan lembaga pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik telah dikembangkan media pertanggung jawaban pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). (Didi Rasidi,2011)

Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut mewajibkan setiap lembaga

negara dalam pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai acuan bagi setiap lembaga pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam wujud akuntabilitas lembaga pemerintah. Laporan ini menjelaskan kegiatan kinerja lembaga pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Panduan ini juga diharapkan dapat membantu persiapan rencana stratejik dan rencana kinerja, dan menerapkan sistem pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang integral. (Mahkamah agung badilag, 2012)

Kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil pencapaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari proses, input, hasil, manfaat, atau konsekuensi. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) perlu diketahui agar dapat menghasilkan yang lebih baik untuk masa depan, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, beberapa hal yang harus diketahui selama proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada lembaga pemerintah Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk mempelajari bagaimana Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Bagi penulis:

1. Untuk melatih keterampilan mahasiswa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari proses perkuliahan dikelas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dunia kerja.

Bagi instansi pemerintah:

1. Dapat meringankan dan membantu kelancaran aktivitas kerja pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan adanya mahasiswa magang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan secara langsung oleh penulis pada Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang

menjadi objek magang, guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan magang.

b. Study Kepustakaan (Library Research)

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan bahan dari buku dan juga laporan-laporan yang berhubungan dengan penulisan ini, serta sumber informasi lainnya untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang didapatkan nantinya.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis akan melakukan kegiatan magang Pada Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat Jl. Khatib Sulaiman No.3, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dimana, waktu pelaksanaan magang akan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis akan membahas beberapa hal permasalahan, diantaranya:

1. Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja Pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub dari bab dimana kerangka-kerangka masalah dengan informasi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini merupakan landasan teori yang membahas dan menjelaskan Pengertian Laporan, pengertian akuntabilitas, pengertian kinerja, pengertian pengukuran kinerja, manfaat pengukuran kinerja, pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, prinsip LAKIP, manfaat LAKIP, fungsi LAKIP, tujuan LAKIP, waktu penyampaian LAKIP, dan dasar hukum pemberlakuan LAKIP.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab III ini terdiri dari sejarah Bappeda Sumbar, visi dan misi Bappeda Sumbar, kedudukan tugas dan fungsi Bappeda Sumbar, struktur organisasi dari Bappeda Sumbar.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan bagaimana proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja pada Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan penulisan laporan dari pengamatan yang sudah dilakukan, dapat dijadikan masukan bagi instansi dari pihak-pihak yang berkepentingan di masa akan datang.

